

BAB V.
***TOXIC SECURITY INSTITUTION* : EKS FALINTIL DAN
PELEMAHAN FUNGSI INSTITUSI KEAMANAN NEGARA
TIMOR LESTE**

Falintil adalah organisasi perlawanan yang dimiliki rakyat Timor Leste untuk berjuang melawan pendudukan Indonesia selama 24 tahun. Sebagai instrumen penting perjuangan, Falintil memiliki jasa yang besar dalam kemerdekaan Timor Leste. Jasa besar ini dibalas oleh PBB maupun pemerintah nasional dengan memberikan *privilege* kepada eks Falintil untuk terlibat dalam pembentukan negara khususnya pembentukan F-FDTL dan PNTL. Namun, keterlibatan aktif tersebut justru berdampak pada ketidakefektifan institusi keamanan negara dalam menjalankan fungsinya. Hal ini dikarenakan eks Falintil tetap mempertahankan norma perjuangannya dengan melakukan praktik-praktik *clientelism* dan nepotisme yang merusak norma-norma liberal yang ditanamkan dalam tubuh F-FDTL, PNTL, dan lembaga peradilan negara.

Bab ini akan menguraikan tentang sejarah Falintil yang pada awal berdirinya menjadi bagian dari partai politik Fretilin hingga menjadi kekuatan nasional yang berhasil memerdekakan bangsa Timor Leste. Pada bagian selanjutnya akan dipaparkan tentang peranan Eks Falintil dalam pembangunan negara Timor Leste khususnya pembentukan F-FDTL dan PNTL. Akhir bab ini akan dijelaskan bagaimana praktek nepotisme dan *clientelism* yang dilakukan oleh eks Falintil berakibat pada buruknya kinerja institusi-institusi keamanan negara dan berdampak pada ketidakamanan nasional sepanjang 2000-2012.

5.1. Dinamika Perjuangan Rakyat Timor Leste : Dari Fretilin menjadi CNRT

Kelahiran Falintil tidak bisa lepas dari dibentuknya Partai Politik *Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente/ Revolutionary Front for an Independent East Timor* (Fretilin) menjelang berakhirnya penjajahan Portugal di Timor Leste. Sikap Portugal untuk memberikan penentuan nasib sendiri bagi bangsa Timor disambut baik oleh rakyat dengan mendirikan beberapa organisasi-organisasi politik. Organisasi pertama yang didirikan adalah Uni Demokratik Timor (*União Democrática Timorense*, UDT), yang didirikan pada tanggal 11 Mei 1974. Organisasi ini memiliki tujuan untuk mengungkap “otonomi progresif” di bawah pemerintahan Portugal.

Organisasi kedua adalah Asosiasi Sosial Demokratik Timor (*Associação Social Democrata de Timor*, ASDT) pada tanggal 20 Mei 1974 yang kemudian berubah nama menjadi Fretilin. Pergantian nama ini mencerminkan adanya pergeseran gerakan yang lebih ke kiri, dengan slogan-slogan anti kolonialisme, anti imperialisme, nasionalisme, dan sebagainya. Tokoh-tokoh Fretilin ketika itu adalah Jose Manuel Ramos Horta, Fransisco Xavier do Amaral, Mari Alkatiri, Nicolau Lobato, dan Justino Mota. Fretilin kemudian membentuk sayap militer Falintil pada 20 Agustus 1974 dan beranggotakan kurang lebih 27.000 pejuang³ (De Almeida, 2017) sebagai instrumen perjuangan mereka untuk memerdekakan Timor Leste. Organisasi ketiga adalah

³ Berdasarkan pada laporan CAQR (*Commission for Matters of Cadres of the Resistance*) tahun 2004, tercatat ada 76.061 *former members of the Falintil*, di mana 10.337 di antaranya adalah *women* (13.5 per cent of the total (Kent & Kinsella, 2015))

APODETI (*Associacao Popular Democratica Timorese*) yang merupakan organisasi politik yang memiliki manifesto untuk bergabung dengan Indonesia dengan status otonomi khusus.

Ketiga organisasi yang memiliki tujuan berbeda ini akhirnya terlibat dalam konflik berdarah. Fretilin secara sepihak memproklamasikan kemerdekaan *Democratic Republic of Timor Leste* (DRET) Timor Timur pada tanggal 28 November 1975 dan memicu penentangan dari berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri. Apodeti, UDT, KOTA⁴, dan Trabalhista⁵ menolak dan mengeluarkan Proklamasi Balibo pada tanggal 30 November 1975 yang berisi tentang pernyataan bahwa Timor Portugal sebagai bagian dari wilayah Indonesia dan tidak mengakui proklamasi sepihak Fretilin. Pertentangan di antara kedua belah pihak berlanjut pada perang saudara untuk memperebutkan kekuasaan di Timor Timur. Kali ini, pasukan gabungan dari Apodeti, UDT, Kota, dan Trabalhista dengan dukungan dari Indonesia mengepung Fretilin dan berakhir dengan kekalahan Fretilin pada tanggal 7 Desember 1975. Sejak saat itulah Tentara Nasional Indonesia (TNI) menggelar pasukannya di Timor Timur untuk menjaga integrasi propinsi ke-27 Indonesia tersebut.

Pasca kekalahan di tahun 1975, Fretilin mengalami beberapa kali perubahan strategi maupun struktur organisasi. Sebelum kekalahan di tahun 1975, Fretilin memiliki strategi perlawanan untuk membebaskan rakyat Timor Leste dari

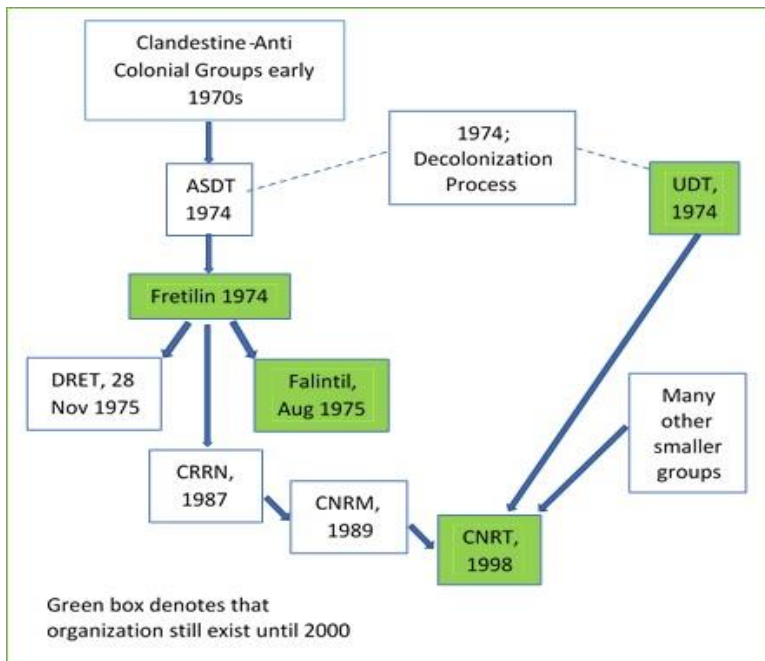
⁴ KOTA (*Klibur Oan Timor Aswain/Asosiasi Putera Pejuang Timor*) adalah sebuah partai para monarki (*liurai*) yang didirikan oleh José Martins, salah satu pendiri Apodeti yang kemudian keluar dari Apodeti dan mendirikan partai tersebut pada tanggal 20 November 1974.

⁵ Trabalhista adalah Partai Buruh yang didirikan pada bulan September 1974 dan mempunyai tujuan kemerdekaan melalui federasi transisi dengan Portugal

penjajahan dan praktik-praktik penindasan lainnya. Oleh karena itu, Gerakan Fretilin tidak hanya untuk perlawanan bersenjata yang dilakukan oleh Falintil saja, namun juga diiringi dengan pemberdayaan politik, ekonomi, dan sosial di kalangan masyarakat. Terdesaknya Fretilin yang berakibat pada keluarnya beberapa pemimpin ke luar negeri dan larinya Falintil ke hutan-hutan menyebabkan strategi ini tidak bisa dijalankan lagi.

Perubahan strategi juga dilakukan untuk menjadikan gerakan perlawanan yang semula identik dengan Fretilin dan Falintil menjadi gerakan yang merangkul semua golongan masyarakat di Timor Leste. Perubahan organisasi perlawanan dimulai dari *a National Conference* di bulan Maret 1981 dengan menunjuk Xanana Gusmao sebagai presiden *National Council for Revolutionary Resistance* (CRRN), dan sekaligus sebagai panglima tertinggi Falintil. Perubahan kembali terjadi pada tahun 1987 di mana Xanana mendeklarasikan Falintil sebagai organisasi non-partisan dan mendirikan *National Council of Maubere Resistance* (CNRM). CNRM diharapkan menjadi suatu organisasi yang dapat memayungi semua pergerakan kemerdekaan yang ada di Timor Leste.

Pergeseran strategi pergerakan kemerdekaan yang lebih inklusif dan non-partisan ini berlanjut dengan dibentuknya *Conselho Nacional de Resistência Timorese/CNRT* di tahun 1998 yang mampu mewadahi partisipasi berbagai partai politik, ideologi, kultur, dan kelompok-kelompok agama baik yang di dalam maupun luar negeri. Pada akhirnya, Xanana Gusmao menempatkan CNRT dan Falintil sebagai basis pergerakan kemerdekaan hingga berhasil meraih kemerdekaan pada tahun 1999 (Niner, 2000).



Gambar 5. 1 Dinamika Organisasi CNRT/Falintil

Diadopsi dari : Niner, S. (2000). A Long Journey of Resistance: The Origins and Struggle of the CNRT. *Bulletin of Concerned Asian Scholars*, 32(1-2), 11-18. <https://doi.org/10.1080/14672715.2000.10415775>

Setelah hancurnya *zonas libertadas*⁶, sifat perlawanan menjadi sangat militer dan didasarkan pada operasi gerilya. Kegiatan utama para kader politik Fretilin adalah membentuk sel-sel bawah tanah di kalangan penduduk yang tinggal di desa-desa. Kader politik Fretilin juga bertugas untuk membantu

⁶ Zona libertadas (wilayah yang dibebaskan) adalah wilayah yang dikuasai oleh Fretilin antara tahun 1975 sampai dengan 1978. Di wilayah ini, Falintil bertugas melindungi rakyat yang sedang membangun kehidupan baru yang bebas dari penindasan, penghisapan, kebodohan dan penyakit (Leach et al., 2009).

satuan-satuan gerilya Falintil yang berada di hutan dengan dukungan logistik dan informasi. Dalam menjalankan strategi gerilya, Gerakan perlawanan di Timor Leste memiliki tiga bentuk 3 *front* perjuangan, yaitu *Frente Armada*, *Frente Cladestine*, dan *Frente Diplomatica* dengan tetap memberikan kesempatan kepada Falintil untuk menjadi pemimpinnya.

Pasca kemerdekaan, eks Falintil memiliki kedudukan yang strategis dalam membangun institusi negara secara umum dan khususnya institusi keamanan negara. Peran untuk menjaga keamanan dilakukan pada saat misi *peacekeeping* INTERFET. Ketika itu Falintil terlibat dalam pengendalian kerusuhan yang terjadi pasca referendum. Keterlibatan Falintil semakin aktif dan strategis semenjak para pemimpinnya seperti Xanana Gusmao, Taur Matan Ruak, Ramos Horta, Marti Alkatiri dan lainnya menempati posisi-posisi penting dalam pemerintahan sementara UNTAET. Pemimpin-pemimpin inilah yang menjadi wakil para veteran dalam bernegosiasi dengan PBB untuk pembentukan tentara dan kepolisian Timor Leste. CNRT juga mendominasi perwakilan masyarakat yang ada di Dewan Nasional dengan menempatkan 7 wakilnya, diikuti oleh 3 orang dari partai politik selain CNRT, dan hanya 1 wakil dari gereja.

5.2. Nepotisme Perjuangan dan Etnisitas di Tubuh Institusi Keamanan Negara

Eks Falintil adalah suatu kelompok kekerabatan yang didasari oleh kesamaan pengalaman dan nilai-nilai yang sama yang diperoleh dari masa-masa perjuangan melawan Indonesia. Pada awal pendirian institusi keamanan negara, eks Falintil menunjukkan soliditas yang erat dalam memaksakan

kepentingan kelompoknya untuk diakomodir oleh PBB. Solidaritas perjuangan menjadi alasan bagi Xanana dan para petinggi Falintil lainnya untuk memaksa PBB mendirikan angkatan bersenjata di Timor Leste. Pemaksaan bermula dari terancamnya eks Falintil dalam pembentukan institusi negara baru Timor Leste. Para veteran memiliki harapan besar untuk dapat melanjutkan keterampilan berperangnya di masa perjuangan dulu ke militer profesional.

Keresahan dari para bekas pejuang ini diperjuangkan oleh para petinggi Falintil dengan mendesak UNTAET untuk mendirikan angkatan bersenjata meskipun hal tersebut tidak ada dalam mandat UNTAET. Xanana Gusmao selaku pemimpin tinggi Falintil memimpin negosiasi dan para pejuang mengancam tetap memegang senjata dan berada di posisi masing-masing jika UNTAET tidak membentuk angkatan bersenjata. Narasumber menyatakan :

“Pada waktu itu, PBB hanya membangun badan kepolisian, dan tidak membangun badan kemiliteran. Hal ini dikarenakan, melihat kondisi geografis yang kecil dan demografis yang sedikit, maka PBB tidak mendirikan badan Kemiliteran. Namun hal ini tidak disetujui oleh mantan pejuang *front Armada* seperti Mayor Jenderal Taur Matan Ruak dan Xanana Gusmão. Sebab selain alasan suatu negara yang sudah merdeka, walaupun kondisi geografisnya kecil dan kondisi demografisnya sedikit tentunya tetap membutuhkan badan kemiliteran atau tentara. Menurut kami para veteran, bila Falintil yang menjadi tentara gerilyawan selama 24 tahun tidak dilibatkan dalam badan

kemiliteran secara resmi maka mereka memilih untuk kembali bergerilya di hutan. Kami juga merasa menjadi korban permainan PBB pada waktu itu”. (AL, 29/11/2018).

Proses negosiasi antara Xanana dan UNTAET ketika itu menghasilkan keputusan untuk mendirikan angkatan bersenjata. Keputusan ini pun masih mendapatkan penentangan dari beberapa veteran karena tidak adanya jaminan terhadap nasib para veteran dalam struktur angkatan bersenjata. Para veteran mendesak supaya mereka ditransformasikan menjadi angkatan bersenjata Timor Leste. Desakan eks Falintil menuai hasil dengan adanya rekrutmen dan seleksi veteran Falintil untuk mengisi 600 anggota batalion yang dilakukan pada Desember 2000 dan Januari 2001. Pada tanggal 31 Januari 2001, UNTAET mendirikan Falintil-*Forças de Defesa de Timor Leste* (F-FDTL) atau angkatan bersenjata Timor Leste. Upacara peresmian dilakukan di Aileu pada tanggal 1 Februari 2001 sebagai tanda dibubarkannya Falintil dan dibentuknya FDTL (Sedra et al., 2009). Meskipun ada anggota Falintil yang diterima sebagai anggota F-FDTL, namun beberapa yang tidak diterima tetap melanjutkan peran-peran keamanan informal terutama dalam intelijen dan pengamanan personal bagi para pejabat negara atau militer. Hal ini tentu saja menyebabkan intervensi institusi informal dalam tugas intelijen dan perlindungan negara serta menyebabkan adanya dua garis komando informal dan formal. (International Crisis Group, 2011).

Keberadaan institusi kepolisian (PNTL) pun tidak bisa lepas dari pengaruh intervensi eks Falintil. Veteran Falintil merasa ada ketidakadilan dalam PNTL di mana anggotanya mayoritas eks Civpol (*Civil Police UN*) yang juga merupakan anggota Polisi Republik Indonesia (Polri) yang dahulunya justru menjadi lawan dari Falintil di masa perjuangan. Dalam keterangannya narasumber menyatakan bahwa nepotisme dalam rekrutmen anggota PNTL ada dalam bentuk rekomendasi komandan untuk anak buahnya. Hal ini seperti yang disampaikan bahwa : “Rekomendasi ada dari komandan peleton, komandan regu yang menyatakan anak buah ini benar-benar veteran dan saya rekomendasikan ke Bapak untuk diterima (di PNTL)” (AA, 23/11/2018). Namun demikian, justru keberadaan eks Falintil dan eks Polri telah berakibat pada rivalitas kubu nasionalis (para veteran) dengan eks polri di tubuh PNTL. Dalam keterangannya, narasumber menyaksikan sendiri bagaimana eks Polri berlatih dalam kelompoknya sendiri di Barapite dan juga kelompok nasionalis melakukan hal yang sama (AA, 23/11/2018). Eks Falintil mendesak kepada UNTAET untuk dapat menerima mereka menjadi anggota PNTL.

Masuknya para veteran Falintil dalam institusi keamanan negara telah berakibat pada benturan antara norma-norma tradisional mereka dengan norma liberal yang dibangun oleh PBB. Norma-norma selama masa perjuangan sangat sulit untuk dilepaskan dari eks Falintil. Seorang narasumber yang telah berjuang selama 24 tahun di hutan menceritakan bagaimana solidaritas dan semangat berjuang yang tidak pernah padam.

“Setelah sebagian tentara pejuang menyerahkan diri, serangan TNI lebih masif lagi. Namun demikian, kami tetap berjuang, walaupun dalam keadaan lapar, kurangnya pakaian, hingga minum air hujan, kami tetap yakin bahwa hidup atau mati harus merdeka “ (AL, 29/11/2018)

Semangat perjuangan juga selalu dikobarkan oleh para pemimpin Falintil. Taur Matan Ruak dalam pidatonya : *“We went through immense difficulties to survive, we went through terrible grief and mourning, we buried valiant comrades, we witnessed the massacre of countless thousands of citizens of our Homeland, all perpetrated without pity or mercy”* (<http://www.etan.org/et2000c/august/20-26/21falint.htm>).

Demikian pula apa yang dilakukan oleh Mayor Jenderal Lere Anan Timur pada tahun 1983 yang memobilisasi kekuatan militer, termasuk orang-orang yang bekerja di Indonesia. Mobilisasi kekuatan ini menunjukkan bahwa rakyat Timor-Leste tidak ingin adanya penindasan dari pemerintah Indonesia, melainkan pengakuan dari pemerintah Indonesia atas hak untuk menentukan nasib sendiri, sama seperti yang dilakukan oleh rakyat Indonesia pada waktu melawan kolonialisme Belanda (AL, 29/11/2018). Semangat perjuangan ini telah membentuk solidaritas yang tinggi di antara para Falintil (International Crisis Group, 2011).

Nepotisme tidak hanya dibangun atas kesamaan pengalaman perjuangan saja, namun juga nepotisme etnisitas. Masyarakat Timor Leste terbagi dalam dua kelompok etnisitas besar yaitu *Lorosa'e* (orang-orang yang berasal dari Distrik Baucau, Los Palos, dan Viqueque) dan Loromanu (yaitu orang-orang dari Distrik Bobonaro, Covalima, Oecussi, Liquica,

Ermera, Aileu, Ainaro, Mantuto, dan Manufahi). Orang-orang *Lorosa'e* identik dengan orang-orang Papua/Melanesia yang bermigrasi ke bagian Timur Timor Leste, sedangkan *Loromonu* merujuk pada orang-orang Melayu/Indonesian yang berpindah ke bagian Barat Timor Leste (Trindade & Castro, 2007)

Semasa penjajahan, Portugis memanfaatkan pengelompokan etnis tersebut untuk membangun konstruksi konfliktual di masyarakat. Portugis menyebut orang-orang *Lorosa'e* sebagai *Firaku* dan orang-orang *Loromanu* sebagai *Kaladi*. Dalam keterangan nara sumber, *Firaku* berasal dari bahasa Portugis *vira o cu* yang maknanya adalah balik badan. Portugis menggunakan kata *Firaku* untuk memberikan *stereotyping* orang-orang *Lorosa'e* memiliki sifat keras kepala, suka membantah, *temperamental*, dan pembuat masalah. Sedangkan *Kaladi* berasal dari kata *Calado* yang bermakna kalem/lembut. Orang-orang *Loromanu* dicitrakan sebagai orang-orang yang penurut dan malas (CIAS, 29/11/2018).

Nepotisme etnis tersebut kembali dikonstruksi oleh Indonesia ketika menjajah Timor Leste. Pemerintah Indonesia lebih memprioritaskan orang-orang *Loromanu* untuk menduduki jabatan-jabatan politik dan publik. Orang-orang *Lorosa'e* mendominasi TNI dan Kepolisian Republik Indonesia. Sementara itu, orang-orang *Lorosa'e* identik dengan gerakan separatisme yang bergabung dalam Fretilin maupun Falintil. Hingga berakhirnya jajak pendapat tahun 1999, pengelompokan ini masih terjadi di mana Indonesia membentuk beberapa milisi pro integrasi yang sebagian besar beranggotakan orang-orang *Loromanu*.

Institusionalisasi keamanan Timor Leste pasca kemerdekaan tetap saja dipengaruhi oleh nepotisme etnis *Lorosa'e-Loromanu*. UNTAET membentuk PNTL dari eks anggota CIVPOL dan eks anggota Polri yang mayoritas beretnis *Loromanu*. Sebagai bentuk ketidakpuasan, orang-orang *Lorosa'e* yang tergabung dalam Falintil mendesak UNTAET untuk membangun angkatan bersenjata FDTL yang berisikan eks-Falintil yang mayoritas *Lorosa'e*.

Tabel 5.1. Nepotisme di Institusi Keamanan Negara

No	Institusi	Etnis Dominan	Kontribusi Perjuangan
1.	PNTL	<i>Loromanu</i>	Minim/Tidak
2.	F-FDTL	<i>Lorosa'e</i>	Ya

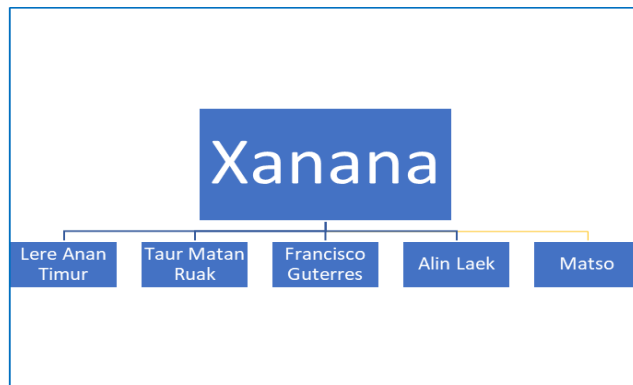
Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Nepotisme di tubuh PNTL juga menjadi catatan penting dari survei yang dilakukan oleh *Asia Foundation* pada tahun 2008. Berdasarkan pada hasil survei dan FGD ditemukan bahwa polisi PNTL masih melakukan beberapa tindakan tidak profesional seperti rendahnya kemampuan inverstigasi sebelum menangkap tersangka, kekerasan terhadap orang yang tidak bersalah, dan hanya merespon permintaan bantuan yang berasal dari keluarga, teman, atau mereka yang memiliki kesamaan afiliasi politik (Chinn & Everett, 2008). Demikian pula yang terjadi di F-FDTL di mana rivalitas *Lorosa'e-Loromanu* juga menjadi salah satu faktor penyebab konflik politik di institusi keamanan negara tersebut (NB, 27/11/2018).

5.3. *Clientelism* dan Faksionalisasi di Institusi Keamanan Negara

Jaringan patron klien di Timor Leste pada era kemerdekaan tidak bisa dilepaskan dari jaring-jaring serupa yang telah ada di masa perjuangan melawan Indonesia. Jaringan-jaring patron klien mulai terbentuk ketika terjadi perpecahan di tubuh Fretilin pada tahun 1984. Ketika itu, Xanana Gusmao selaku panglima Falintil sekaligus ketua komite sentral CRRN menginginkan adanya persatuan nasional dengan menggandeng sebanyak mungkin kelompok-kelompok politik yang ada. Keinginan ini ditentang oleh Mari Alkatiri dan orang-orang marxist radikal lainnya yang ada di Fretilin. Pertikaian antara Xanana dan Mari Alkatiri terus berlanjut dan sulit diselesaikan hingga munculnya pemisahan Falintil dari Fretilin pada tahun 1987 dan pembentukan CNRT pada tahun 1998. Pada tahun 2000, Mari Alkatiri membawa Fretilin keluar dari CNRT yang diketuai Xanana.

Pertikaian antara Mari Alkatiri dan Xanana telah membentuk dua kluster besar *clientelism* di Timor Leste. Kluster Mari Alkatiri terdiri dari anggota Fretilin yang memiliki faham marxist radikal dan para pejuang Falintil yang tidak dapat bergabung dengan F-FDTL. Beberapa patron yang kemudian menjadi sub kluster Alkatiri seperti Kilik Wae Gae, Mauk Moruk (Paulo Gama), Oligari Asswain, Cornelio Gama atau yang lebih dikenal dengan L-7 (Elle Sette), Rogerio Lobato, dan Gascao Salsinha. Sementara itu beberapa patron yang membentuk sub kluster Xanana terdiri atas Lere Anan Timur, Taur Matan Ruak, Francisco Guterres, Alin Laek, dan Matso (AL, 30/11/2018).



Gambar 5. 2 Klaster Patron-Klen Xanana

Sumber: Diolah dari hasil wawancara



Gambar 5. 3 Klaster Patron-Klen Alkatiri

Sumber: Diolah dari hasil wawancara

Pembentukan F-FDTL pada tahun 2000 semakin memunculkan ketegangan di antara faksi-faksi. Para pejuang yang tidak diakomodir dalam F-FDTL melampiaskan kekecewaannya dengan membentuk kelompok-kelompok pergerakan. Kelompok mantan gerilyawan yang paling berpengaruh terhadap stabilitas keamanan dan politik Timor

Leste adalah Dewan Pertahanan Rakyat Republik Demokratik Timor-Leste (CPD-RDTL) yang dipimpin oleh Olo-Gari Aswain dan Cristiano Da Costa (Sindre, 2016). Kelompok ini melakukan demonstrasi besar-besaran terhadap pemerintah Fretilin, menuduh kepemimpinan korupsi dan nepotisme. Kelompok lain adalah Sagrada Familia, yang dipimpin oleh mantan komandan Falintil Elle Sete (alias L-7). Elle Sete berselisih dengan beberapa komandan Falintil termasuk Xanana Gusmao. Pada April 2000, ia meninggalkan barak Falintil Aileu bersama beberapa tentaranya dan senjata mereka untuk kembali ke tempat kelahirannya di Baucau. Selain didukung oleh mantan pejuang, kedua kelompok ini juga didukung oleh petani miskin dan pemuda pengangguran yang tidak aktif selama perang (Sindre, 2016).

Selain dua kelompok utama ini, juga terdapat 'kelompok keamanan' sporadis yang berada di bawah payung asosiasi Mantan Pejuang 1975 (AC75) yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Rogerio Lobato. Kelompok Lobato meliputi kelompok-kelompok otonom yang lebih kecil yang dipimpin oleh mantan pemimpin gerilyawan seperti Samba Sembilan (S9), Colimau 2000, yang merupakan mantan kelompok perlawanan klandestin sinkretis yang dipimpin oleh beberapa mantan komandan Falintil (Sindre, 2016). Beberapa sub-sub kelompok yang didirikan oleh mantan pejuang lainnya juga ada, namun mereka memiliki afiliasi dan hubungan patronase dengan kelompok veteran besar Sagrada Familia dan CPD-RDTL yang menjadi bagian dari kelompok Mari Alkatiri (Rees, 2004; Soares 2003).

Hubungan patron klien di masa perjuangan juga telah merusak pola hirarki organisasi modern yang dibangun di PNTL dan F-FDTL. Para bekas pejuang yang ada di PNTL maupun F-FDTL justru lebih taat pada pimpinan mereka di masa perjuangan dari pada pemimpin di PNTL/F-FDTL. Loyalitas perjuangan ini seringkali menyebabkan penentangan bawahan terhadap atasan di tubuh PNTL/F-FDTL. Satu kasus pembangkangan terjadi di Distrik Covalima di mana bawahan menentang perintah atasan bahkan dengan ancaman. Nara sumber menyatakan pengalamannya bahwa :

“Di Distrik saya Covalima ada Titi Dias (seorang polisi yang kini sudah meninggal). Dia pangkatnya sersan. Komandanya perintah Dia bilang mau tranfer dari satu daerah ke daerah lain. Dia menolak, “kamu sembarang saja kamu tidak pantas untuk transfer saya, kalau kamu macam-macam, aku tembak kau kasih mati”. (Pembicaraan ini lewat HT sehingga semua mengetahui)” (AA, 23/11/2018).

Pembangkangan juga dilakukan oleh narasumber kami yang pada saat krisis 2006, berada dalam satu peleton bersama Salsinha dan Mayor Alfredo. Narasumber yang ketika itu diajak oleh Alfredo untuk memberontak menyatakan loyal kepada Taur Matan Ruak selaku panglima F-FDTL. Kepatuhan ini didasari oleh kesetiaan pada masa perjuangan di mana Taur adalah atasan langsungnya. Padahal, di dalam struktur kesatuannya di F-FDTL, narasumber adalah bawahan langsung Mayor Alfredo. Narasumber menyatakan bahwa :

“Secara hirarki kemiliteran posisi Alfredo lebih tinggi dari saya, walaupun durasi perjuangan saya lebih lama ketimbang Alfredo Reinaldo. Saya tidak mau diatur

olehnya dalam pemberontakan 2006. Saya lebih patuh kepada panglima perjuangan saya dahulu (Taur Matan Ruak)” (AL, 29/11/2019).

Perlindungan patron dalam hal ini para pemimpin Falintil di politik terhadap klien mereka berbentuk pemberian ampunan (*amnesty*) atau pengurangan hukuman kepada para bekas Falintil yang tersangkut perkara hukum. Praktik ini semakin mudah dilakukan oleh Falintil karena mereka berhasil mendudukkan orang-orangnya dalam pemimpin politik tertinggi negara baik presiden, ketua parlemen, maupun perdana menteri. Tercatat ada 185 pemberian keringanan hukuman dari presiden kepada para veteran yang terlibat konflik 1999 dan 2006, serta 13 pengampunan hukuman dari tahun 2004-2010 (Sedra, Harris, 2011). Intervensi politik terhadap keputusan pengadilan tersebut semata-mata untuk melindungi para veteran dari jeratan hukum. Para pemimpin Timor Leste berdalih bahwa para veteran telah memiliki jasa yang besar dalam perjuangan meraih kemerdekaan, sehingga tidak sepatutnya untuk dihukum. Panglima F-FDTL yang juga komandan Falintil, Taur Matan Ruak, telah mengintervensi proses pengadilan yang sedang menginterogasi tuduhan penyelundupan senjata oleh para senior Falintil dan bekas Menteri pertahanan Timor Leste. Dia mengkritik proses itu sebagai “*criminalizing those who defended the nation*” (Sedra, Harris, 2011). Praktik impunitas ini tentu saja melemahkan fungsi institusi pengadilan yang menjadi bagian dari institusi keamanan negara.

5.4. Pengaruh Buruk (*Toxic*) Institusi Eks Falintil terhadap Keamanan Nasional

Perilaku nepotisme dan patron klien dapat dilakukan oleh eks Falintil karena mereka memiliki *privilege* politik dan sosial. Secara politik, eks Falintil mendapatkan prioritas dalam berbagai skema pembangunan negara yang dijalankan oleh PBB. PBB beranggapan bahwa pengaturan kembali Eks Falintil melalui program DDR adalah kunci keberhasilan mereka dalam membangun negara baru Timor Leste. Namun sayangnya PBB tidak sepenuhnya berhasil menjalankan DDR (Hamutuk, 2005). Prioritas secara politik juga diberikan kepada CNRT sebagai perwakilan Eks Falintil dalam *National Consultative Council* (NCC) yang memiliki posisi strategis selama masa UNTAET.

Keuntungan-keuntungan politik juga dinikmati oleh Eks Falintil dengan mendirikan berbagai partai politik. Dominasi eks falintil nampak dalam pembagian kekuasaan di tingkat negara maupun distrik yang dikuasainya. Praktis, negara Timor Leste dikuasai oleh eks Falintil yang memasuki parlemen, pemerintahan, aparat keamanan, hingga pelaku bisnis.

Privilege secara sosial juga diperoleh eks Falintil dari pengakuan masyarakat atas jasa-jasa perjuangannya. Hal ini terungkap dari hasil survei yang menyatakan bahwa 16% responden menyatakan sangat setuju dan 57 % menyatakan setuju terhadap kebijakan pemerintah yang memberikan keistimewaan kepada veteran. Serangkaian kebijakan pemerintah tersebut seperti undang-undang tentang veteran, pembentukan organisasi veteran, dan diberikannya hak-hak keistimewaan seperti penghargaan jasa kepahlawanan, dana pensiun, dan proyek-proyek pembangunan. Mereka secara sah

mendapatkan banyak perlakuan istimewa dalam berbagai urusan bermasyarakat dan bernegara.

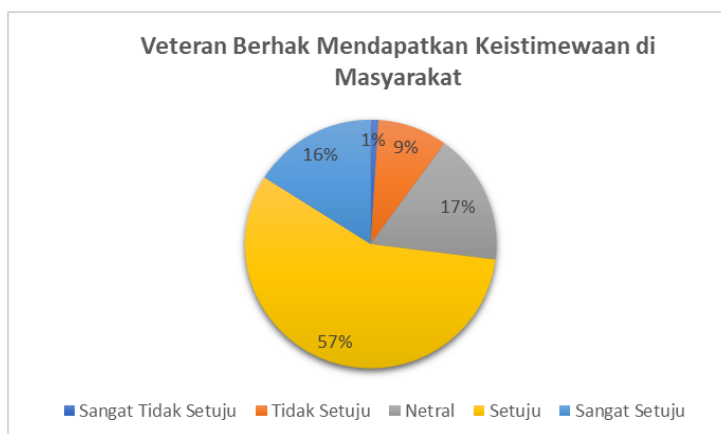


Diagram 5. 1 Pandangan Masyarakat terhadap Hak Keistimewaan bagi Eks Falintil

Sumber: Olah data kuantitatif dengan SPSS

Kebijakan pengistimewaan terhadap para veteran ini sejalan dengan penghormatan masyarakat terhadap jasa-jasa veteran. Hasil survei menunjukkan bahwa 54% responden menyatakan sangat setuju dan 43 % setuju jika jasa-jasa veteran harus dihormati.

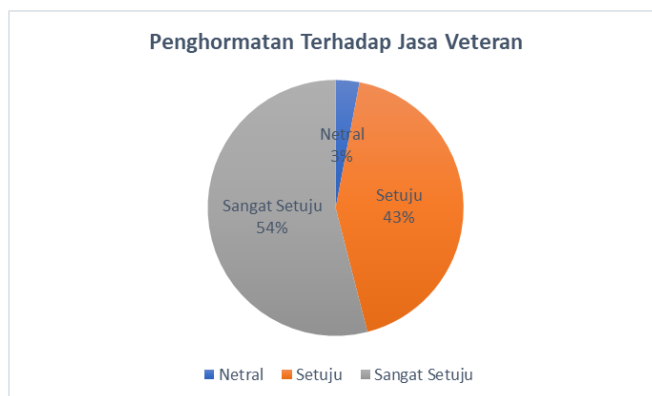


Diagram 5. 2 Pandangan Masyarakat terhadap Jasa Veteran Falintil

Sumber: Olah data kuantitatif dengan SPSS

Meskipun responden mengabsahkan keistimewaan veteran dalam struktur sosial dan menghormati nilai-nilai perjuangan mereka, namun pemberian keistimewaan hak kepada veteran juga memunculkan permasalahan egaliterianisme di masyarakat. Veteran justru mendominasi persamaan politik di masyarakat dari desa hingga ke pusat pemerintahan. Ada kebijakan pengistimewaan bagi veteran Falintil untuk kemudian menjadi polisi, tentara, atau bahkan pejabat-pejabat Negara. Hal ini tentu saja bertentangan dengan demokrasi yang menganut egalitarianisme dan tentu akan berdampak pada stabilitas demokrasi dan keamanan. Seorang nara sumber yang tidak mau disebut identitasnya menyatakan bahwa:

“Kadang veteran juga menjadi penghambat pembangunan dan penyebab konflik. Misalkan pemerintah memprioritaskan veteran untuk menjalankan proyek listrik di suatu desa. Antara mereka saling

rebutan misalkan veteran ini mau pegang proyek ini. Yang lainnya bilang jangan karena wilayah ini milik veteran ini sehingga proyek tidak terealisasi karena ada sengketa ini. Kadang sama penduduk yang bukan veteran ada semacam kesenjangan sosial. Veteran sudah punya gaji terus mereka masih main proyek dan kadang yang lainnya juga merasa kemerdekaan ini bukan hanya perjuangan dari kaum veteran. Yang jadi permasalahan di organisasi veteran, tercatat banyak sekali veteran tetapi kenyataannya di jaman Indonesia dia menjadi partisan tetapi di jaman kemerdekaan mereka mengaku pejuang. Itu menjadi kelemahan verifikasi“ (Anonim, 24/11/2018)

Eks Falintil tidak jarang melakukan praktik-praktik nepotisme dan clientelisme di institusi politik maupun keamanan. Praktik-praktik ini justru mengakibatkan kegagalan institusi negara untuk menjadi profesional dalam menjaga keamanan nasional dan masyarakat. PNTL dan F-FDTL justru menjadi sumber ketidakamanan negara karena mereka terlibat konflik bersenjata pada kurun waktu 2006-2008.

Krisis 2006 bermula dengan adanya konflik penembakan antara PNTL dan FDTL di Lospalos, dan dapat dikatakan bahwa krisis 2006 merupakan krisis politik dalam internal institusi F-FDTL. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya krisis tersebut adalah terjadinya ketimpangan di dalam internal F-FDTL sendiri, dimana para anggota F-FDTL yang berasal dari kubu *Loromonu*, kendatipun berpengetahuan tinggi namun selalu ditempatkan pada posisi yang lebih rendah seperti anggota biasa, sementara itu anggota F-FDTL dari kubu

Lorosa'e kendatipun tidak berpengetahuan namun selalu mendapatkan posisi yang lebih tinggi, seperti komandan atau mayor jenderal.

Konflik juga dilatarbelakangi oleh adanya isu bahwa hanya kubu *Lorosa'e* yang melakukan perang melawan kolonialisme, Loromonu tidak ikut berperang dan hanya menikmati hasil kemerdekaan. Sebagai akibatnya sebanyak 500 petisioner meninggalkan markas F-FDTL (RL, 29/11/2018). Konflik mengalami eskalasi ketika Mayor Alfredo Reinado dan beberapa pengikutnya dari tentara maupun polisi keluar dari kesatuannya dengan membawa senjata dan melakukan pemberontakan. Puncaknya adalah ketika terjadi pertempuran bersenjata antara F-FDTL dengan PNTL di dekat markas PNTL pada tanggal 25 Mei 2006 yang menewaskan 12 orang polisi.

Krisis 2006 menunjukkan bahwa program-program penguatan personel maupun institusi yang dilaksanakan PBB belum mampu menciptakan *democratic governance* dalam institusi modern. Elit politik masih mengintervensi kedua institusi tersebut dengan memainkan isu-isu pejuang dan bukan pejuang serta isu-isu etnis *Lorosa'e - Loromonu*. Isu ini cukup sensitif mengingat eks Falintil masih menggunakan romantisme atas jasa-jasa mereka selama masa perjuangan kemerdekaan dalam berinteraksi dengan orang lain. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan narasumber yang menyatakan :

“Batalion pertama di Lospalos, kebanyakan prajurit-prajurit di sana berasal dari Oekusi, Lequisa dan distrik lainnya di bagian barat Timor Leste. Setiap *weekend* mereka keluar dari markas dan mengunjungi keluarga. Setiap mereka kembali ke markas di Lospalos mereka

terlambat, sedangkan tentara dari Bacau, Viqueque, dan Lospalos tidak terlambat. Tentara barat selalu terlambat ikut apel hari senin. Lelucon keluar dari Komandannya : “kalian-kalian *Loromonu* itu pro-otonomi, tidak disiplin selalu terlambat”. Lelucon ini berlanjut di tingkat pasukan yang berasal dari Timur. “Kalian dari *Loromonu* yang tidak ingin merdeka”. Tentara dari Barat tidak terima karena mereka merasa ikut berjuang. Ini menjadi besar dan sampailah pada komandan-komandan senior yang dari barat. Mereka mulai protes dan keluar sehingga terjadilah peristiwa 2006. Kenapa merembet sampai polisi, karena komandan polisi adalah *Loromonu* dan banyak anggotanya *Lorosa’e*. Meluaslah hingga ke masyarakat. Komandan tentara dari *Lorosa’e*. Menteri dalam negeri *Loromonu*, Lobato mempersenjatai polisi dengan senjata berat. Dan di-backup politisi-politisi di parlemen.“ (NB, 27/11/2018).

Para tentara yang berasal dari *Loromonu* terprovokasi dengan adanya isu diskriminatif di F-FDTL. Bagi tentara yang berasal dari *Loromonu*, mereka akan dipersulit untuk mendapatkan jabatan tinggi meskipun tingkat pendidikan mereka lebih tinggi dari pada tentara yang dari *Lorosa’e*. Hal ini karena kontribusi orang-orang *Loromonu* lebih kecil bahkan tidak ada dalam perjuangan kemerdekaan.

“Satu hal mendasar kenapa mereka keluar dari markas F-FDTL adalah pelayanan yang berbeda antara *Loromonu* dan *Lorosa’e*. Tentara bagian barat meskipun lulusan universitas/mahasiswa tetapi tidak bisa menduduki pangkat yang tinggi. Tetapi yang dari timur meskipun tidak sekolah bisa menjadi kapten hingga mayor (RL, 29/11/2018)”

Seorang narasumber menyatakan:

“Krisis 2006 bermula dengan adanya konflik penembakan antara PNTL dan FDTL di Los Palos, dan dapat dikatakan bahwa krisis 2006 merupakan krisis politik dalam internal institusi F-FDTL. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya krisis tersebut adalah terjadinya ketimpangan di dalam internal F-FDTL sendiri, dimana para anggota F-FDTL yang berasal dari kubu *Loromonu*, kendatipun berpengetahuan tinggi namun selalu ditempatkan pada posisi yang lebih rendah seperti anggota biasa, sementara itu anggota F-FDTL dari kubu Loro Sa’e kendatipun tidak berpengetahuan namun selalu mendapatkan posisi yang lebih tinggi, seperti komandan atau mayor jenderal” (RL, 28/11/2018).

Informasi serupa juga disampaikan oleh narasumber lainnya yang juga merupakan eks pejuang Falintil.

“Pada tahun 2006, saya, Alfredo dan Salsinha bersama kelima peleton semuanya berasal dari F-FDTL, kami yang melakukan kerician di Timor-Leste... (Kericuhan dilakukan) Karena Alfredo lebih mendengar pengaruh orang lain (*politikus*) ketimbang saya, bahwa kubu *Loromonu* tidak melakukan perang melawan kolonialisme, yang melakukan perang atau perjuangan merebut kemerdekaan ialah kubu *Loro Sa’e*... Alfredo terjebak dalam isu politik sekaligus memiliki ambisi untuk menjadi pemimpin dalam F-FDTL” (AL, 29/11/2018).

Ketidakpuasan dari beberapa eks Falintil juga muncul pasca krisis 2006-2008. Lito Rambo (yang merupakan pelaku penembakan terhadap polisi) membentuk kelompok baru *Forsa Reservistas Falintil no Juventude Clandestina* (*Reserve Force*

of *FALINTIL and Clandestine Youth*). Rambo berargumentasi bahwa hanya sebagian kecil orang saja yang ditetapkan sebagai tersangka pasca krisis politik tahun 2006-2008. Dia mengklaim memiliki 500 pejuang dengan ratusan orang yang siap berjuang jika diprovokasi. Kelompok ini memiliki 1000 pendukung setia ketika pertama kali melakukan konferensi pers. Tahun 2010 juga masih diwarnai oleh konflik antara eks Falintil dengan PNTL setelah adanya penangkapan terhadap Cornelio Gama, seorang pemimpin *Sagrada Familia* dan anggota parlemen dari partai UNDERTIM. Selain itu eks Falintil dan juga anggota parlemen dari partai UNDERTIM, Faustino 'Renan Selak' dos Santos, mengejar petugas polisi dengan golok di distrik Lautem (*Timor News Online*, 2010).

PNTL dan F-FDTL sebagai sumber ketidakamanan pada tahun 2006-2008 dirasakan oleh masyarakat Timor Leste. Sebanyak 51 % responden menyatakan setuju dan 17 % sangat setuju terhadap perseteruan antar veteran di PNTL dengan F-FDTL sebagai penyebab konflik 2006-2008. Trauma terhadap peristiwa 2006-2008 juga menyebabkan masyarakat tidak merasakan peran veteran dalam menjaga keamanan mereka. Mayoritas responden menyatakan ragu (34 %), tidak setuju (23 %) dan bahkan 2% responden sangat tidak setuju untuk menempatkan veteran sebagai penyedia keamanan bagi mereka.



Diagram 5. 3 Pandangan Masyarakat tentang Peran Keamanan Eks Falintil

Sumber: Olah data kuantitatif dengan SPSS

Dalam konteks penegakan keadilan, Presiden sering kali melakukan intervensi terhadap proses hukum melalui pengampunan maupun pengurangan masa tahanan. Praktik ini didasari oleh pola hubungan patron klien di antara pada eks Falintil. Presiden Ramos Horta pada tanggal 25 Desember 2009 memberikan 3 pengampunan (1 di antaranya diberikan pada anggota F-FDTL pelaku penembakan PNTL)dan 46 pengurangan masa tahanan (di mana 3 di antaranya anggota F-FDTL penyerang anggota PNTL) (Sedra et al., 2009). Sebagaimana diketahui bahwa anggota F-FDTL tersebut adalah veteran yang merupakan kelompok pro-Xanana Gusmao. Maka praktik pengampunan itu adalah bentuk dari perlindungan terhadap veteran Falintil.

Kasus pengampunan juga diberikan kepada seorang mantan perwira polisi dan mantan pejuang gerilya FALINTIL bernama Amaro Suarez da Costa (yang lebih dikenal sebagai

"Susar"). Dia adalah anggota terkemuka kelompok pemberontak untuk serangan 11 Februari dan serangan Fatu Ahi pada 23 Mei 2006. Susar mendapatkan pengampunan dari Presiden bersama dengan 26 mantan personel sektor keamanan lainnya yang dibebaskan dan akan kembali ke F-FDTL atau PNTL. "Susar" dianggap memiliki nilai politik karena statusnya sebagai veteran gerilya (Sedra, Harris, & Burt, 2011). Selain kasus "Susar", CIGI mencatat ada 433 pemberian keringanan hukuman dan 26 pengampunan kepada sebagian besar eks pejuang Falintil yang terjerat hukum (Sedra, Harris, & Burt, 2011),

Afiliasi politik jaksa agung Ana Pessoa yang merupakan tokoh senior Fretilin dan kepercayaan Xanana, juga telah menyebabkan beberapa spekulasi bias politik dalam peradilan. Penutupan kasus pendistribusian senjata ilegal kepada masyarakat sipil pada tahun 2006 sangat bias kepentingan politik. Kasus tersebut ditutup setelah diketahui ada keterlibatan mantan Menteri Pertahanan dan komando senior F-FDT dan komandan F-FDT (Sedra, Harris, Burt, et al., 2011). Berbagai praktik intervensi politik dalam peradilan tersebut tentu saja memberikan indikasi bahwa eks Falintil adalah kelompok yang kebal terhadap hukum. Hal ini berdampak pada ketidakadilan hukum bagi masyarakat.

Sejak kemerdekaan, isu veteran (eks-Falintil) menjadi sangat kontroversial. Ketika lembaga donor internasional dan Pemerintah Timor Leste harus menghargai jasa-jasa para pejuang dengan berbagai skema kebijakan, namun justru skema-skema tersebut berakibat pada perpecahan di kalangan veteran dan ketidakamanan di masyarakat (Fundasaun Mahein, 2011). Kajian yang dilakukan oleh *International Crisis Group*

(2011) menyimpulkan PBB dan pemerintah Timor Leste gagal untuk memberikan skema pensiun yang adil bagi para bekas pejuang. Demikian pula dengan kegagalannya untuk membendung dominasi politik “Generasi 75” (eks-Falintil) dan peran dalam institusi keamanan negara yang justru memperlemah fungsi institusi tersebut (International Crisis Group, 2011).

Dalam penelitian lainnya, Ursula De Almeida (2017) menyimpulkan bahwa reintegrasi mantan gerilyawan Falintil kurang berhasil mencapai tujuan karena kurangnya persiapan dan keterlibatan mantan gerilyawan serta komunitas penerima lainnya dalam proses reintegrasi. Kekurangan-kekurangan tersebut berimplikasi pada munculnya ketegangan dan kecemburuan sosial yang masih berlanjut, seperti dalam kaitannya dengan pensiun veteran (De Almeida, 2017). Skema pemberian pensiun dinilai telah memunculkan “birokrat jalanan” dalam masa registrasi (Roll, 2013) dan tidak mengakomodasi perempuan yang sebenarnya juga berkontribusi dalam perjuangan dan menjadi korban dari perjuangan tersebut (Kent & Kinsella, 2015). Bahkan, skema pensiun telah mengakibatkan konflik sosial berkepanjangan di Timor Leste (Brandao, 2013).

Keberadaan eks pejuang dalam reformasi sektor keamanan memang menjadi isu penting di berbagai negara atau wilayah pasca konflik, seperti halnya di Filipina. Filipina dan Timor Leste memiliki kesamaan pada integrasi atau diserapnya eks pejuang ke institusi militer dan polisi negara. Meskipun keduanya memiliki kesamaan, namun proses integrasi berjalan tidak sama. Inisiasi proses integrasi eks pejuang MNLF dilakukan secara mandiri oleh pemerintah Filipina, sedangkan

integrasi eks-Falintil didisain oleh UNTAET. Eks pejuang MNLF hanya diserap dalam militer dan polisi regional Mindanao, sedangkan eks Falintil adalah bagian dari proyek yang lebih besar dalam membangun institusi keamanan negara. Untuk pembiayaan program, Filipina mendanai reintegrasi dengan dibantu beberapa lembaga donor sedangkan di Timor Leste seluruh dana reintegrasi berasal dari lembaga-lembaga donor internasional (Hall, 2009).

Masuknya eks pejuang MNLF ke dalam Angkatan Bersenjata Filipina dan *Special Regional Security Force (SRSF)* Mindanao memiliki dampak yang hampir sama dengan masuknya Eks Falintil ke F-FDTL dan PNTL. Kedua-duanya berdampak pada identitas institusi keamanan yang dibangun. Di Filipina, muncul permasalahan pada persaingan identitas Islam yang dipercayai oleh eks pejuang MNLF dengan Katolik yang menjadi agama mayoritas anggota tentara dan Polisi. Di Timor Leste, persaingan membangun identitas militer dan kepolisian terjadi antara orang-orang yang loyal dengan Gumao dan yang tidak serta antara loromanu-lorosa'e. Masuknya eks pejuang juga berdampak pada kurang profesionalnya aparat institusi keamanan negara karena sebagian besar para eks pejuang tidak memiliki pendidikan formal. Pengalaman dan nilai-nilai perjuangan juga menjadi hambatan bagi institusi keamanan negara untuk membangun nilai-nilai liberal dalam institusi mereka (Hall, 2009).

Perpecahan di tubuh eks pejuang pun menjadi aspek yang sama dalam kasus Filipina dan Timor Leste. Para bekas pejuang MNLF yang tidak terakomodir dalam institusi keamanan negara seperti kelompok Abu Sayaf akhirnya menjadi "spolier" atau pengganggu keamanan negara. Demikian juga

dengan para pejuang Falintil yang tidak masuk dalam F-FDTL seperti L-7, Renan Selak, dan lainnya mendirikan kelompok-kelompok pengganggu keamanan.

Pengalaman berbeda dialami oleh bekas pejuang *The Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front* (EPRDF) yang berhasil menggulingkan pemerintah dan mengalahkan tentara nasional Ethiopia pada tahun 1991. Selama proses SSR dari tahun 1991-1997, EPRDF berhasil menjadi tentara nasional Ethiopia yang baru dan menjadikannya alat pertahanan negara yang efektif dalam menjaga keamanan. Keberhasilan ini didukung oleh independensi dan kemampuan politik EPRDF dalam merancang reformasi angkatan bersenjata tanpa adanya intervensi politik dan lembaga-lembaga donor. EPRDF berhasil membawa budaya keamanannya yang sama sekali berbeda dengan tentara terdahulu dan mampu menghindari konflik-konflik politik dalam urusan pertahanan negara (Berhe, 2017).